



INOVASI DAERAH DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

Wahyudi Kumorotomo
kumoro@map.ugm.ac.id



Simposium Nasional
Tahun 2009 Tanpa Korupsi
KMAN-UGM
Jogjakarta, 28 Februari 2009

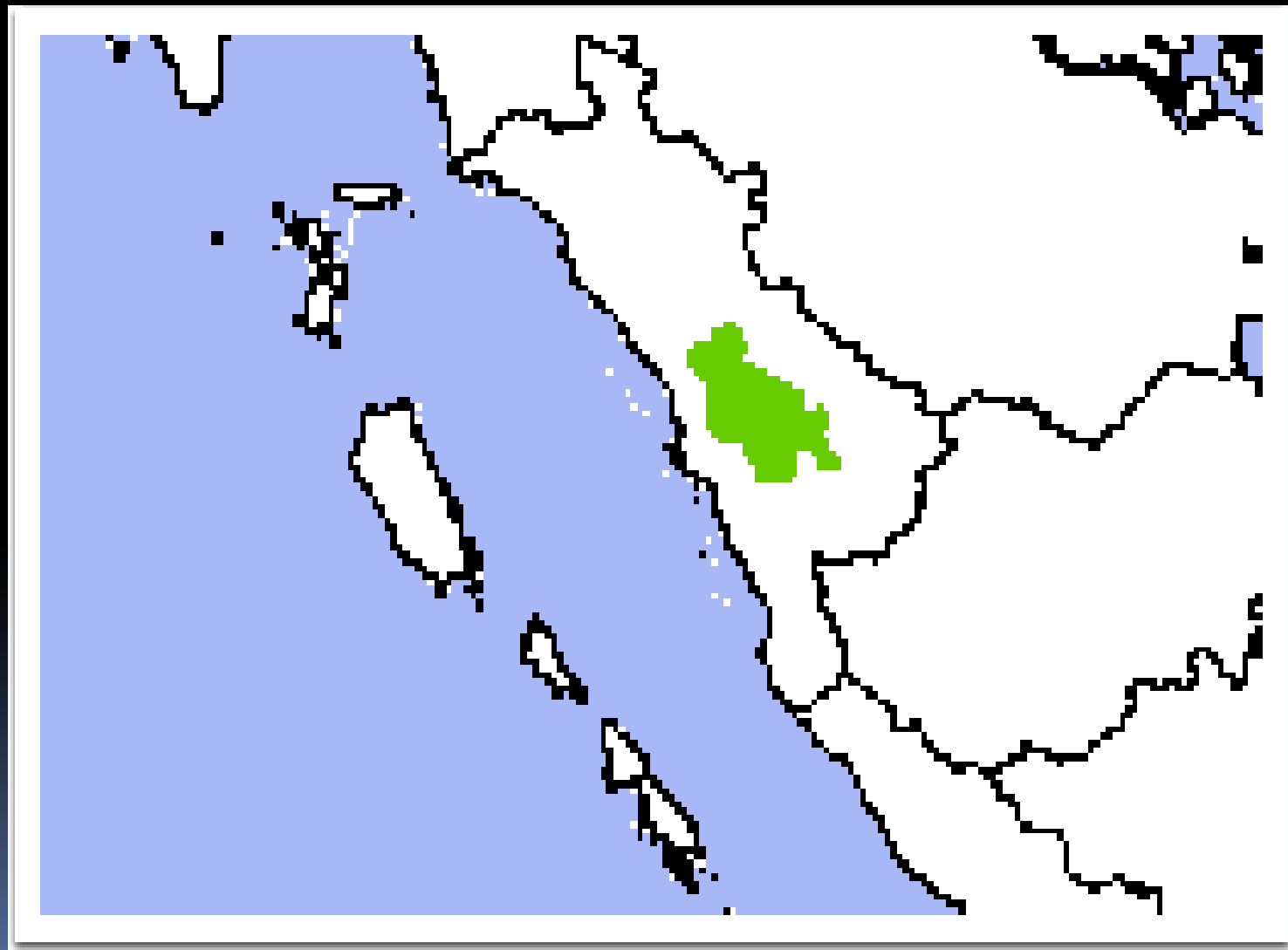
FAKTA TENTANG KORUPSI

- Korupsi menekan rasio investasi terhadap PDB
- Tidak mungkin diberantas tanpa pendekatan *extra-ordinary*
- Pencegahan → plus pemberantasan
- KPPOD: Lebih 50% pengusaha daerah menunjuk aparat birokrasi sebagai aktor utama korupsi
- Bagaimana daerah mengelola dana desentralisasi tanpa korupsi?
(Rp 327,08 triliun atau 37,72% dari APBN 2009)

STRATEGI PENCEGAHAN

- Strategi umum pengendalian korupsi: 1) sistemik-struktural, 2) abolisionistik, 3) moralistik
- Klitgaard et al (2002): $C = M + D - A$
- Unsur pokok dalam pencegahan: kepemimpinan, dukungan publik, transparansi
- Dari mana harus mulai? → Transparansi
- Efek langsung transparansi (Kristiansen, 2006): tanggungjawab perumus kebijakan, *checks & balances*, pengendalian korupsi, efisiensi layanan publik.

Kabupaten Solok



KABUPATEN SOLOK: KOMUNIKASI POLITIK



- Kepemimpinan: sederhana, merakyat, teladan anti-korupsi, menindak tegas & konsisten staff yg korup
- Terobosan: potong honor (Rp 14 M), remunerasi berdasarkan kinerja, Pakta Integritas, Perda 5/2004 ttg Transparansi & Partisipasi
- Unsur pokok inovasi: komunikasi efektif, pers, LSM, civil society, "Duduk Basamo".





KABUPATEN KEBUMEN:LELANG TERBUKA

- Terobosan: lelang terbuka di alun-alun; modifikasi Keppres No.80/2003.
- Pemanfaatan media untuk lelang terbuka: koran nasional-daerah, radio, televisi, dialog interaktif
- Penghematan Rp 14,4 M (11%) dari nilai total lelang
- Potensi konflik & kelemahan: resistensi DPRD, pemanfaatan aanwijzing untuk mengatur pemenang tender.







KOTA JOGJA: E-GOV

- Survei TII menempatkan Jogja sebagai kota terbersih dari 50 sampel (peringkat-1, skor: 6,43). Apa rahasianya? → E-government
- E-gov: dengan dukungan TIK menjamin interaksi antara aparat Pemda, masy & swasta yg efisien, efektif dan produktif
- Pembentukan UPIK (Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan) → dg dukungan Walikota, memaksa aparat untuk responsif (80% SMS dapat langsung ditanggapi)
- UPTSA sejak 2000 → diperkuat menjadi Dinas Perijinan. E-gov membuat semua prosedur & biaya layanan transparan, menutup peluang korupsi birokratis.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Telp. (0274) 515865, 515866, 514448, 562682
E-mail Internet : perizinan@jogja.go.id
E-mail Intranet : perizinan@intra.jogja.go.id
YOGYAKARTA

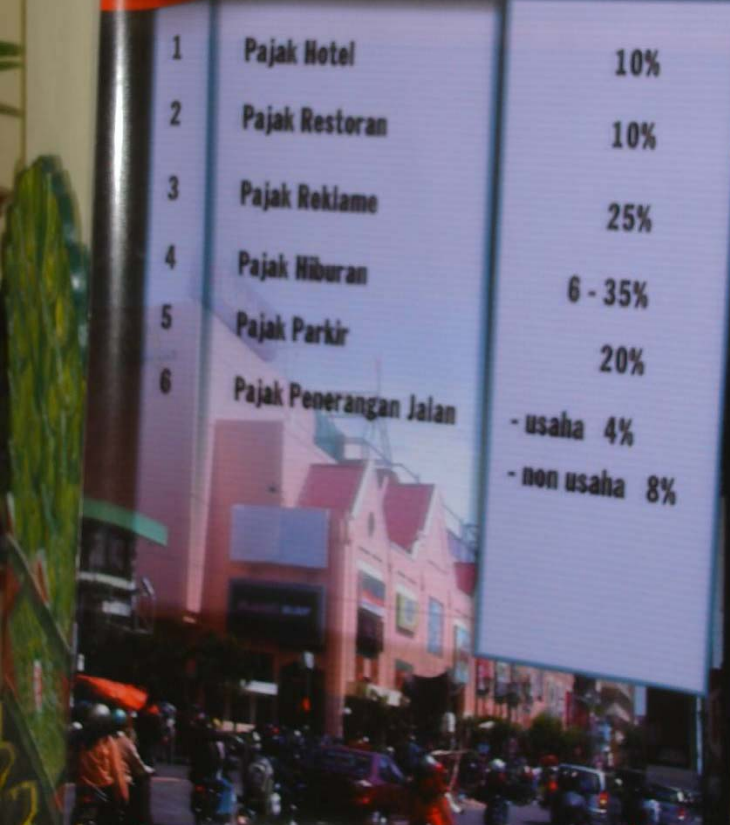
Kode Pos 55145

Poster Tarif Pajak Daerah

Tahukah anda jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota Yogyakarta



NO	JENIS PAJAK	TARIF PAJAK
1	Pajak Hotel	10%
2	Pajak Restoran	10%
3	Pajak Reklame	25%
4	Pajak Hiburan	6 - 35%
5	Pajak Parkir	20%
6	Pajak Penerangan Jalan	- usaha 4% - non usaha 8%



Dinas Perijinan Kota Jogja



KESIMPULAN BEST PRACTICES

- Tiga strategi pencegahan korupsi: 1) transparansi, 2) kepemimpinan, 3) dukungan publik
- Jangka pendek → Transparansi. Korupsi terjadi dengan modus *deceit and concealment*, transparansi menangkal modus ini.
- Jangka menengah → Kepemimpinan. Bagaimana Pilkada langsung dapat menghasilkan pimpinan daerah yang anti-korupsi?
- Jangka panjang dan berkelanjutan → Dukungan Publik. Pada dasarnya pencegahan korupsi membutuhkan komitmen kolektif dan dukungan publik.